

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan perilaku agresif telah menjadi suatu hal yang sangat biasa terjadi pada kehidupan sosial individu saat ini. Di Indonesia, berita mengenai penganiayaan, pemerkosaan, perampokan bahkan pembunuhan sering dimuat media cetak dan elektronik. Hal ini wajar saja, karena perilaku agresif merupakan naluri dasar yang ada pada tiap individu. Menurut Freud (dalam Davidoff, 1991) insting membunuh dan menghancurkan sudah ada dalam diri individu sejak lahir. Insting tersebut akan terus menumpuk dan tak terbendung lagi hingga akhirnya meluap dalam bentuk kekerasan yang mendadak.

Sears dkk, (1991) menyatakan bahwa serangan dan frustrasi merupakan kondisi yang sering menghasilkan agresi. Serangan adalah gangguan atau tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang. Frustrasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, misalnya keinginan pergi ke suatu tempat, ingin melakukan sesuatu, atau menginginkan sesuatu tetapi dihambat.

Perilaku agresi pada pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena sosial yang akhir-akhir ini sering muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku tersebut. Penelitian Suharyanto (2002) melakukan eksplorasi tentang bentuk-bentuk perilaku agresi PKL di sekitar Pasar Besar Kotamadya Malang dan

faktor penyebab dari perilaku agresi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Malang, Jatim, dengan jumlah subjek sebanyak enam orang yang tergabung dalam Paguyuban PKL Sumber Rejeki Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku agresi pada PKL muncul disebabkan karena provokasi (pembeli yang cerewet), represifitas petugas, dan frustrasi (pendapatan yang menurun). Dan salah satu bentuk perilaku agresi PKL yang paling mendominasi yang sering terjadi di sekitar pasar besar kota Malang adalah marah-marah disamping seringkali pula terjadi cekcok/selisih pendapat antar sesama teman PKL hingga menyebabkan terjadinya perkelahian/baku hantam baik dengan petugas maupun sesama teman PKL.

Kota Surakarta yang telah berkembang menjadi kota besar juga tidak terlepas dari permasalahan PKL. Berdasarkan pendataan lapangan yang dilakukan oleh lurah dan camat per September 2009 di Kota Surakarta ada 5.847 PKL yang tersebar di 51 kelurahan di 5 kecamatan. Lokasi persebaran PKL tersebut dikategorikan menjadi 5 yaitu: Pertama, PKL di Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Jenderal Sudirman; Kedua, di sepanjang jalan utama kota; Ketiga, di seputar Monumen Perjuangan Banjarsari; Keempat, di seputar Stadion Manahan; Kelima, di jalan antar lingkungan dan jalan kampung yang menyebar di seluruh kecamatan.

Diharapkan program relokasi terhadap PKL di Kota Surakarta selalu berhasil, seperti keberhasilan program relokasi PKL Monuman Bajarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya permasalahan PKL dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana tanpa menggunakan

kekerasan. Hanya saja diperlukan kesabaran dan kesungguhan dari pemerintah dalam menghadapi para PKL. Seperti langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dalam menata PKL diperlukan adanya pendekatan yang persuasif dan dialog langsung yang berkesinambungan agar diperoleh informasi yang berguna dalam penyusunan kebijakan. Dengan melibatkan PKL dalam penyusunan kebijakan tersebut maka akan terbuka kesadaran para PKL untuk bersedia ditata dan ditertibkan karena kebijakan tersebut bersumber dari para PKL sendiri (Atmoko, 2009).

Kenyataan yang terjadi program relokasi tidak semuanya berhasil dengan persuasif. Kasus tentang penggusuran yang berakhir dengan bentrokan terjadi antara lain di Jalan Veteran, Surakarta. Pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang Jalan Veteran menolak adanya penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pedagang kaki lima yang telah membayar retribusi tanah, iuran keamanan serta telah membeli gerobag seragam warna hijau dari pihak kelurahan enggan meninggalkan tempatnya. Pedagang kaki lima yang merasa telah berjualan ditempat yang legal dan sudah menaati peraturan yang ada mencoba untuk bertahan dengan melakukan perilaku agresi berupa cacimaki, mendorong serta memukul aparat Satpol PP. Usaha yang dilakukan para pedagang kaki lima tersebut tidak digubris sedikitpun, dan aksi penggusuran tetap dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Kota Surakarta (Solopos, 23 Maret 2010).

Penertiban pedagang kaki lima di sekitar Stadion Manahan Surakarta juga diwarnai kericuhan. Para pedagang kaki lima sempat bentrok dengan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta yang berusaha

merobohkan kiosnya. Insiden ini berakhir setelah para pedagang kaki lima dipukul mundur oleh petugas Satpol PP. Pedagang kaki lima berusaha mempertahankan kiosnya karena mengaku telah mengantongi izin untuk berjualan di tempat tersebut. Kios yang terbuat dari bangunan semi permanen akhirnya berhasil dibongkar dan diangkut ke dalam truk. Penertiban di jalan sekitar Stadion Manahan ini dilakukan karena keberadaan pedagang kaki lima dianggap merusak tata kota (Solopos, 26 April 2010).

Perilaku agresif yang dilakukan merupakan reaksi terhadap sesuatu yang menekan atau mengganggu dan dilampiaskan keluar dalam bentuk perilaku agresi fisik maupun verbal. Perilaku agresi fisik yaitu perilaku agresi yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan secara fisik seperti menampar, memukul, melempar dengan benda terhadap orang lain di sekitarnya. Perilaku agresi verbal yaitu perilaku agresi yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata tertentu untuk menyerang orang lain, dapat berupa ejekan, hinaan dan cacimaki (Khumas, dkk. 1997). Banyak kerugian yang dapat ditimbulkan akibat perilaku-perilaku agresi tersebut, baik berupa kerugian materi hingga kerugian yang tidak bisa dihitung dengan materi seperti pemerkosaan dan hilangnya nyawa seseorang.

Urbanisasi sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal positif, tetapi juga hal-hal negatif. Sebagian para urbanit telah tertampung di sektor formal, namun sebagian urbanit lainnya -tanpa bekal ketrampilan yang dibutuhkan di kota tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tersedia. Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada

umumnya tetap berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya.

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal dikenal juga dengan 'ekonomi bawah tanah' (*underground economy*). Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas.

Sektor informal sering dijadikan kambing hitam dari penyebab kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relatif lebih independent atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan tidak adanya bantuan kredit. Hal ini mengakibatkan pedagang kaki lima selalu dihinggapi rasa was-was jika terjadi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dagangan yang kurang laku, dan pendapatan yang rendah. Sementara kebutuhan hidup selalu meningkat, kebutuhan sekolah anak, pembayaran retribusi kebersihan, keamanan, dan tuntutan masalah ekonomi lainnya membuat para pedagang kaki lima selalu dalam keadaan tertekan. Masalah-masalah seperti inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kecenderungan perilaku agresif pada individu.

Menurut hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa pedagang kaki lima di Kota Surakarta yaitu di daerah Pasar Klewer dan Ps. Gede Surakarta didapat hasil bahwa pedagang kaki lima yang

cenderung untuk mempertahankan daerahnya dengan melakukan perilaku agresif baik verbal maupun fisik, namun tidak semua pedagang kaki lima melakukan perilaku agresif. Sebagian pedagang kaki lima berusaha menerima pengusuran dengan lapang dada asalkan mendapat ganti rugi yang sesuai. Pedagang kaki lima yang mempunyai anggapan bahwa bangunan mereka yang berada di tanah legal dan akan digusur cenderung melakukan perilaku agresif. Perilaku agresif pedagang kaki lima tersebut berupa cacimaki, mendorong dan memukul petugas yang melakukan pengusuran, namun tidak semua pengusuran berakhir dengan bentrokan dan aksi kekerasan oleh para pedagang kaki lima.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku agresif pada individu, diantaranya adalah teritorialitas. Menurut Ley dan Cibriwsky (dalam Sarwono, 1995) kecenderungan perilaku agresif yang disebabkan teritorialitas menjadi makin kuat pada situasi-situasi dimana batas-batas teritori tidak jelas atau bisa dipermasalahkan. Ditambahkan pula oleh Ardrey (dalam Koeswara, 1988) kecenderungan perilaku agresif karena teritorialitas diciptakan melalui proses evolusi untuk mengancam, berkelahi, bahkan membunuh jika perlu untuk mempertahankan teritorialnya.

Masalah teritorialitas merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian khusus disamping faktor-faktor lainnya. Masalah teritorialitas tersebut lebih menitikberatkan pada bagaimana individu mempertahankan daerah teritorialnya. Hal ini tergantung dari pengalaman, pengharapan, motivasi dan emosi yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya.

Intervensi terhadap teritorialitas meskipun tidak dapat dihubungkan secara konklusif dengan agresi, ada temuan bahwa teritorialitas dapat meningkatkan kemungkinan agresi di berbagai konteks, seperti dalam kondisi keluarga yang tinggal berdesak-desakan di rumah yang sempit, lingkungan penjara, dan pelanggaran ruang pribadi. Temuan-temuan eksperimental menunjukkan bahwa efek meningkatkan agresi pada diperantarai rangsangan afektif negatif yang ditimbulkan oleh persepsi subjektif mengenai keterbatasan ruang. Mendukung ulasan ini Sarwono (1995) mengemukakan individu akan mengembangkan pikiran-pikiran dan kepercayaan-kepercayaan tentang teritori, misalnya percaya bahwa tanah dan rumah yang dihuninya adalah warisan nenek moyangnya secara turun temurun sejak jaman dahulu, atau menganggap bahwa negaranya adalah yang paling indah di seluruh dunia, atau merasa bahwa ia yang paling berhak atas tempat berjualan yang paling strategis karena lebih dulu datang di tempat tersebut. Akhirnya, setelah keyakinan-keyakinan ini berkembang, orang akan melakukan tindakan untuk mempertahankan teritorinya itu. Di sinilah terbuka kemungkinan untuk terjadinya konflik dan agresif dengan orang lain yang bermaksud mengintervensi teritori itu.

Setiap individu berbeda-beda dalam mempertahankan teritorialitasnya. Hal ini dapat dilihat dalam kasus penggusuran yang dilakukan terhadap para pedagang kaki lima. Penggusuran terhadap para pedagang kaki lima tersebut dilakukan dengan berbagai macam dalih dan alasan. Satu diantaranya adalah bahwa para pedagang kaki lima menempati lahan milik negara atau jalur hijau. Para pedagang yang merasa membayar retribusi tiap bulannya menganggap bahwa tempat usaha

yang selama ini didiami adalah tempat yang legal sehingga saat terjadi penggusuran para pedagang kaki lima merasa harus mempertahankan tempat mereka. Akibatnya terjadilah bentrokan antara petugas eksekutor dengan para pedagang kaki lima hingga mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka (Edy, 2008).

Kondisi yang mungkin terjadi pada pedagang kaki lima bila wilayah atau teritorialitasnya terancam oleh individu lain, maka kecenderungan untuk mempertahankan secara agresif akan semakin tinggi. Individu secara normatif akan selalu berusaha untuk mempertahankan daerahnya, tapi jika daerah teritorinya diganggu maka individu tersebut akan cenderung melakukan perilaku agresif, namun tidak semua individu melakukan perilaku agresif. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Stadion Manahan yang memperlihatkan bahwa para pedagang kaki lima yang mempunyai pandangan negatif cenderung melakukan perilaku agresif dengan mencaci-maki, memukul dan melempar dengan batu. Kasus di Jalan Veteran memperlihatkan hal yang sebaliknya, para pedagang kaki lima memilih jalan damai dengan pindah ke tempat yang telah disediakan Pemerintah Kota Surakarta.

Adanya perbedaan pada kasus tersebut menyebabkan munculnya pertanyaan pada penelitian ini yaitu, apakah ada hubungan antara intervensi terhadap teritorialitas dengan kecenderungan perilaku agresif pada pedagang kaki lima ? Adanya permasalahan tersebut maka peneliti mengambil judul: Hubungan Antara Intervensi Terhadap Teritorialitas dengan Kecenderungan Perilaku Agresif Pada Pedagang Kaki Lima Di Surakarta.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hubungan antara intervensi terhadap teritorialitas dengan kecenderungan perilaku agresif pada pedagang kaki lima.
2. Mengetahui peran intervensi terhadap teritorialitas terhadap tingkat kecenderungan perilaku agresif pada pedagang kaki lima.
3. Mengetahui tingkat intervensi terhadap teritorialitas dan tingkat kecenderungan perilaku agresif pada pedagang kaki lima.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, pengetahuan bagi para PKL, Pemerintah Kota Surakarta, maupun masyarakat luas, mengenai hubungan antara intervensi terhadap teritorialitas dengan kecenderungan perilaku agresif pada pedagang kaki lima, diharapkan terbuka kesadaran baru para PKL dalam menjaga teritorialnya dan mengembangkan teritori sesuai dengan aturan yang berlaku untuk meminimalisir intervensi terhadap teritorialitasnya.

Manfaat lain penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman PKL agar memiliki sikap yang positif terhadap peraturan-peraturan pengelolaan PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga memudahkan rekonstruksi dan pengembangan pola penataan PKL dengan lebih kondusif sesuai aspek tata kota, ekonomis, sosial, budaya, dan sekaligus sebagai upaya mengendalikan kecenderungan perilaku agresif pada PKL.